

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Penentuan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) didasarkan pada **Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020** tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Secara umum, kondisi harga berbagai komoditas pangan dan kebutuhan pokok selama periode Oktober hingga Desember 2025 menunjukkan variasi fluktuasi harga bulanan di seluruh jenis barang. Fluktuasi harga berbagai komoditas dipengaruhi oleh moment menuju hari raya natal dan tahun baru, serta tidak lepas dari kondisi cuaca.

Inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Jawa Tengah pada Oktober 2025, sebesar 2,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,22. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tegal sebesar 2,98 persen dengan IHK sebesar 110,01 dan terendah terjadi di Purwokerto sebesar 2,71 persen dengan IHK sebesar 108,15. Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) Provinsi Jawa Tengah bulan Oktober 2025 sebesar 0,40 persen dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) sebesar 2,01 persen.

Pada November 2025, inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,79 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,43. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Semarang sebesar 2,92 persen dengan IHK sebesar 108,64 dan terendah terjadi di Kabupaten Wonogiri sebesar 2,47 persen dengan IHK sebesar 109,75. Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) Provinsi Jawa Tengah bulan November 2025 sebesar 0,19 persen dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) sebesar 2,20 persen.

Pada Desember 2025, inflasi *year on year* (y-on-y) Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,72 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,98. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Semarang sebesar 2,84 persen dengan IHK sebesar 109,10 dan terendah terjadi di Kabupaten Rembang sebesar 2,47 persen dengan IHK sebesar 113,16. Tingkat inflasi *month to month* (m-to-m) Provinsi Jawa Tengah bulan Desember 2025 sebesar 0,50 persen dan tingkat inflasi *year to date* (y-to-d) sebesar 2,72 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kota Pekalongan dalam melaksanakan strategi pengendalian inflasi 4K hingga periode Triwulan IV Tahun 2025 ini, antara lain:

1. Masih tingginya alih fungsi lahan pertanian sehingga produksi pangan semakin menurun;
2. Mekanisme pasar menjadi salah satu faktor pembentuk harga pada komoditas pangan, seperti cabe rawit, cabe merah, dan bawang merah, yang tidak terkait dengan jumlah ketersediaan (supply) maupun tingkat kebutuhan/permintaan (demand);
3. Kota Pekalongan bukan merupakan daerah pemasok sehingga harga ditentukan dari daerah pemasok atau daerah penghasil

Cuaca dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi, juga menjadi faktor yang berpengaruh terhadap jumlah ketersediaan stok yang bermuara pada fluktuasi harga pada beberapa komoditas pangan di Kota Pekalongan

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

**1. Rapat Koordinasi minggu I bulan Oktober 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :**

Hari/tanggal : Senin, 6 Oktober 2025

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 BPKAD Kota Pekalongan

Hasil :

1. Rapat Koordinasi dipimpin oleh dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Bapak Tomsu Tohir. Rapat Koordinasi ini diikuti oleh Bapanas, BPS, Bulog, Kejaksaan RI, Kementan, Kementrian PKP, Kantor Staf Presiden, para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
2. Kondisi inflasi bulan ke bulan (September 2025 terhadap Agustus 2025) sebesar 0,21%. Inflasi tahun ke tahun (September 2025 terhadap September 2024) sebesar 2,65%. Inflasi tahun kalender (September 2025 terhadap Desember 2024) sebesar 1,82%. Pada bulan September 2025 mengalami inflasi setelah sebelumnya mengalami deflasi pada Agustus 2025. Inflasi tahunan September 2025 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan September 2024.
3. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,38% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,11%. Beberapa komoditas penyumbang utama inflasi dari kelompok tersebut adalah cabai merah, daging ayam ras, dan cabai hijau. Inflasi ketiga komoditas tersebut memiliki pola yang berbeda jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, di mana pada September 2024, ketiga komoditas tersebut mengalami deflasi.
4. Berdasarkan hasil Monev Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan dari tanggal 29 September 2025 sampai 6 Oktober 2025, terdapat peningkatan jumlah pemda yang telah melakukan 9 upaya pengendalian inflasi. Namun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Dari 9 upaya tersebut, terdapat 6 upaya konkrit. Per tanggal 6 Oktober 2025, terdapat 43 Pemda yang sudah melakukan 6 upaya konkrit, 159 Pemda telah melakukan 4 s/d 5 upaya, 287 Pemda telah melakukan 1 s/d 3 upaya, 25 Pemda belum melakukan sama sekali upaya konkrit dalam penanganan inflasi.
5. Badan Pangan Nasional menyampaikan realisasi penyaluran SPHP Beras Tahun 2025 yang masih mencapai 29,24 %. Badan Pangan Nasional bersama stakeholder lainnya selalu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan nasional melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Realisasi GPM bulan Januari-Oktober 2025 sebanyak 9.582 kali.
6. Dalam upaya mensukseskan program 3 juta rumah, Kementrian PKP merekomendasikan Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber biayanya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

**2. Rapat Koordinasi minggu II bulan Oktober 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :**

Hari/tanggal : Senin, 13 Oktober 2025

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Abhipraya Bapperida Kota Pekalongan

Hasil :

1. Rapat Koordinasi dipimpin oleh dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Bapak Tomsu Tohir. Rapat Koordinasi ini diikuti oleh Bapanas, BPS, Bulog, Kejaksaan RI, Kementan, Kementrian PKP, Kantor Staf Presiden, para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
2. Kondisi inflasi bulan ke bulan (September 2025 terhadap Agustus 2025) sebesar 0,21%. Inflasi tahun ke tahun (September 2025 terhadap September 2024) sebesar 2,65%. Inflasi tahun kalender (September 2025 terhadap Desember 2024) sebesar 1,82%. Pada bulan September 2025 mengalami inflasi setelah sebelumnya mengalami deflasi pada Agustus 2025. Inflasi tahunan September 2025 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan September 2024.
3. BPS menyampaikan komoditas yang menyumbang andil tertinggi tahun kalender 2025 periode Januari-September adalah emas perhiasan (0,43%), beras (0,18%), cabai merah (0,17%), dan tarif air minum PAM (0,14%).
4. Pada M2 Oktober 2025 tercatat 17 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 21 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 17 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah dan daging ayam ras.
5. Kenaikan IPH tertinggi menurut wilayah di Pulau Sumatera terjadi di Kab. Tapanuli Selatan dengan nilai perubahan IPH 6,43%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di wilayah tersebut didominasi oleh cabai merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Kab. Tasikmalaya dengan nilai perubahan IPH 2,51%. Komoditas penyumbang andil IPH terbesar di wilayah tersebut didominasi oleh cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit.
6. Dalam upaya mensukseskan program 3 juta rumah, Kementrian PKP merekomendasikan Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber biayanya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

3. Rapat Koordinasi minggu III bulan Oktober 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2025

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 BPKAD Kota Pekalongan

Hasil :

1. Rakor tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan fokus membahas strategi pengendalian inflasi dan percepatan realisasi belanja daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua sisi penting yang harus

dijaga secara bersamaan, hal tersebut juga disampaikan oleh Menkeu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melompat kalau dua mesin bergerak, yaitu mesin swasta dan mesin pemerintah.

3. Salah satu cara menggerakkan mesin pemerintah adalah dengan mengoptimalkan realisasi belanja daerah. Langkah itu bukan hanya mempercepat peredaran uang di masyarakat, tetapi juga menstimulasi aktivitas sektor swasta agar roda ekonomi terus berputar. Kemendagri, secara rutin melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan APBD di 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, guna memastikan pendapatan dan belanja daerah berjalan efektif setiap bulannya.
4. Angka pertumbuhan ekonomi nasional saat ini mencapai 5,12 persen. Pemerintah daerah diminta untuk lebih agresif dalam mendorong kegiatan ekonomi agar pertumbuhan bisa melampaui rata-rata nasional. Menjaga pertumbuhan ekonomi seperti menjaga inflasi. Keduanya harus stabil agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat
5. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya percepatan realisasi anggaran daerah agar manfaat pembangunan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
6. Kepala daerah untuk menjaga inflasi. inflasi di daerah masih dalam tren terkendali. Dari 38 provinsi, 37 diantaranya tercatat inflasi positif, hanya 1 provinsi, yaitu Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi.
7. Daya beli masyarakat tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi sehat, dan disiplin fiskal kuat. Defisit APBN hanya 1,56 persen dari PDB. surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen, dan kemiskinan mencapai 8,47 persen, level terendah sejak krisis 1998.
8. Hingga September 2025, realisasi belanja APBD nasional baru mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3 persen dari total pagu Rp1.389 triliun, dengan belanja modal turun 31 persen dan belanja barang/jasa menurun 10,5 persen. Artinya perputaran ekonomi daerah masih lambat. Jangan tunggu akhir tahun baru belanja. Uang harus segera bekerja agar ekonomi hidup
9. Yang menjadi sorotan masih rendahnya integritas pengelolaan anggaran di beberapa daerah, berdasarkan data KPK 2024, dengan skor SPI nasional hanya 71,53, di bawah target 74.
10. Peningkatan kinerja daerah akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk menambah alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di tahun mendatang.

**4. Rapat Koordinasi minggu IV bulan Oktober 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :**

Hari/tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 BPKAD Kota Pekalongan

Hasil :

1. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Mendagri, Bapak Tito Karnavian, diikuti oleh Bapanas, BPS, Bulog, Kejaksaan RI, Kementan, Kementrian PKP, Kementrian Koperasi, Kantor Staf Presiden, para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
2. Kondisi inflasi bulan ke bulan (September 2025 terhadap Agustus 2025) sebesar 0,21%. Inflasi tahun ke tahun (September 2025 terhadap September 2024) sebesar 2,65%. Inflasi kalender (September 2025 terhadap Desember 2024) sebesar 1,82%. Pada bulan September 2025 mengalami inflasi setelah sebelumnya mengalami deflasi pada

Agustus 2025. Inflasi tahunan September 2025 lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan September 2024.

3. BPS menyampaikan komoditas yang menyumbang andil tertinggi tahun kalender 2025 periode Januari-September adalah emas perhiasan (0,43%), beras (0,18%), cabai merah (0,17%), dan tarif air minum PAM (0,14%).
4. Kemendagri terus memonitor perkembangan daerah-daerah yang telah melakukan enam upaya konkrit dalam penanganan inflasi daerah. Per tanggal 27 Oktober 2025 terdapat 43 daerah yang telah melaksanakan enam upaya konkrit, 160 daerah telah melakukan 4 s/d 5 upaya konkrit, 286 daerah baru melaksanakan 1 s/d 3 upaya, 25 daerah belum melakukan sama sekali upaya konkrit dalam penanganan koperasi.
5. Kemenkop menyampaikan penyebab inflasi daerah yaitu gangguan rantai puncak pasok dan biaya distribusi tinggi, ketergantungan pada barang dari kota, fluktuasi musiman produksi pertanian, keterbatasan akses pembiayaan modal usaha, dan kurangnya integrasi informasi harga dan pasar.
6. Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam pengendalian inflasi adalah sebagai lembaga stabilisator harga, pengelola distribusi dan logistik desa, penyalur pembiayaan mikro, pusat informasi harga dan produksi, serta agen program pemerintah.
7. Dalam upaya mensukseskan program 3 juta rumah, Kementrian PKP merekomendasikan Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber biayanya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).

5. Rapat Koordinasi minggu I bulan November 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 4 November 2025

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Tiga Negeri Setda Kota Pekalongan

Hasil :

1. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Mendagri, Bapak Tito Karnavian, diikuti oleh Bapanas, BPS, Bulog, Kejaksaan RI, Kementan, Kementrian PKP, Kantor Staf Presiden, para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
2. Perkembangan inflasi nasional per Oktober 2025 dilihat dari tingkat inflasi tahun ke tahun adalah sebesar 2,86%. Sedangkan dilihat dari inflasi bulan ke bulan, inflasi bulan Oktober 2025 terhadap September 2025 adalah sebesar 0,28%. Komoditas makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang andil terbesar dalam tingkat inflasi.
3. Pada bulan Oktober 2025, 26 provinsi mengalami inflasi dan 12 provinsi mengalami deflasi. Lima provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi adalah Banten, Kalimantan Tengah, Kep. Bangka Belitung, Jawa Barat, dan D.I. Yogyakarta. Sedangkan lima daerah yang mengalami deflasi terdalam adalah Papua Pegunungan, Sulawesi Tenggara, Papua, Sumatera Utara, dan Papua Barat.
4. Berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi Oktober di tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi. Deflasi beras secara bulan (m-to-m) di bulan Oktober ini lebih dalam

dibandingkan September 2025. Secara umum 23 provinsi mengalami deflasi, 3 provinsi stabil dan 12 provinsi inflasi.

5. Berdasarkan hasil pemantauan harga pangan strategis, komoditas yang berada dalam status harga tidak aman adalah ayam ras, jagung tingkat peternak, Minyakita, beras medium (zona 3), dan telur ayam ras.
6. Berdasarkan pemaparan Menteri Pertanian, sampai dengan M4 Oktober, terdapat 51 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga beras. Kota Pekalongan termasuk yang mengalami kenaikan sebesar 0,16 %.
7. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyampaikan rencana program kegiatan TA 2026 adalah Pengentasan Kumuh, Bantuan Sanitasi, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Pembangunan Rumah Susun & Rumah Khusus, dan Bantuan Pengembangan Permukiman (PSU Tapak dan Vertikal).

**6. Rapat Koordinasi minggu III bulan November 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :**

Hari/tanggal : Senin, 17 November 2025

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Tiga Negeri Setda Kota Pekalongan

Hasil :

1. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Wamendagri, Bapak Bima Arya, diikuti oleh Bapanas, BPS, Bulog, Kejaksaan RI, Kementan, Kemendag, Kementerian PKP, Kantor Staf Presiden, Badan Gizi Nasional, TNI, Polri, para Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.
2. Perkembangan inflasi nasional per Oktober 2025 dilihat dari tingkat inflasi tahun ke tahun adalah sebesar 2,86%. Sedangkan dilihat dari inflasi bulan ke bulan, inflasi bulan Oktober 2025 terhadap September 2025 adalah sebesar 0,28%. Komoditas makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang andil terbesar dalam tingkat inflasi.
3. Emas perhiasan adalah komoditas utama penyumbang inflasi Oktober 2025. Komoditas emas perhiasan telah mengalami inflasi tahunan (y-on-y) selama 45 bulan berturut-turut (mulai dari Februari 2022). Ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi pasar keuangan, dan inflasi mendorong investor mengalihkan aset ke emas sebagai safe heaven.
4. Pada M2 November 2025, tercatat 5 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 33 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 5 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah dan beras.
5. Progres Program MBG per 10 November 2025 oleh Badan Gizi Nasional, terdapat 15.162 SPPG dengan 41.310.040 penerima manfaat. Target bulan Desember 2025 adalah 25.000 SPPG dan Februari 2026 adalah 32.000 SPPG.
6. Beberapa komoditas yang pada minggu terkini berada dalam status harga tidak aman adalah ayam ras pedaging hidup (livebird), beras medium (zona 3), jagung tingkat peternak, telur ayam ras, dan Minyakita.

**7. Rapat Koordinasi minggu IV bulan November 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :**

Hari/tanggal : Senin, 24 November 2025

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Tiga Negeri Setda Kota Pekalongan

Hasil :

1. Rapat yang digelar secara hybrid dihadiri secara virtual oleh Kepala BPS, perwakilan Badan Pangan Nasional, dan pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, serta lembaga terkait lainnya. Keterlibatan pejabat eselon I dan II menunjukkan bahwa isu inflasi tetap menjadi perhatian serius pemerintah sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
2. Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa inflasi nasional hingga Oktober 2025 berada pada level 2,86 persen (year-on-year) - masih dalam rentang target 1,5 hingga 3,5 persen.
3. Beberapa komoditas seperti emas perhiasan, cabai, dan beras masih memberikan tekanan harga yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah.
4. Laporan World Gold Council yang menyebutkan dua dari tiga masyarakat Indonesia memilih emas sebagai instrumen investasi. Kondisi ini mendorong permintaan dan membuat harga emas melonjak hingga Rp 2,237 juta per gram, yang menjadi salah satu faktor kontributor inflasi nasional.
5. Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga November 2025 menunjukkan dinamika bervariasi. Harga beras turun di 280 kabupaten/kota, diikuti cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan minyak goreng. Namun, kenaikan harga tetap terjadi di sejumlah wilayah, terutama bawang merah (naik di 196 daerah) dan daging ayam ras (lebih dari 90 daerah).
6. Menghadapi kondisi fluktuatif, pemerintah pusat menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah. Strategi pengendalian inflasi akan difokuskan pada stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, dan percepatan intervensi di daerah yang mengalami lonjakan harga. Ketersediaan bahan pangan pokok menjadi perhatian utama karena berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

**8.** Rapat Koordinasi minggu I bulan Desember 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa, 2 Desember 2025

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Tiga Negeri Setda Kota Pekalongan

Hasil :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsu Tohir, memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dari Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri. Rapat digelar secara hybrid bersama kementerian/lembaga terkait
2. Kondisi inflasi secara Nasional BPS Pusat melaporkan inflasi bulan Nopember 2025 berada pada 0,17% (m-t-m), 2,72% (y-o-y), dan 2,27% (y-t-d). Sedangkan untuk Inflasi Kabupaten Jember sebesar 0,08% (m-t-m), 2,44% (y-o-y), dan 1,90% (y-t-d).
3. Pudji Ismartini Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik menyebutkan menurut sebaran Provinsi inflasi Bulan November 2025 m-to-m sebanyak

28 provinsi mengalami inflasi dan 10 provinsi mengalami deflasi.

4. Emas perhiasan masih menjadi komoditas utama penyumbang inflasi November 2025 , emas mengalami inflasi 27 bulan berturut-turut.
5. Sedangkan komoditas Beras, Daging ayam, cabai merah dan telur ayam menjadi peredam inflasi pada November 2025 karena mengalami deflasi.
6. Menjelang Natal dan Tahun Baru Pemerintah Pusat meminta kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga stabilisasi harga melalui koordinasi lintas sektor dan segera mengambil langkah-langkah apabila terjadi kenaikan harga dengan menjaga ketersediaan pasokan di pasar. Selain itu, Pemerintah Daerah diminta memperkuat pengelolaan Cadangan Pangan Daerah secara mandiri.
7. Dalam Rakor ini Pemerintah Pusat menghimbau agar pemerintah daerah mengajak masyarakat turut serta memberikan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
8. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kemendagri, Kemenpora, dan Kemen UMKM terkait sinergi pengelolaan sarana prasarana olahraga. Pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan aset olahraga, khususnya stadion yang tidak terpakai, melalui pemanfaatan profesional atau kerja sama dengan pihak swasta.

**9.** Rapat Koordinasi minggu II bulan Desember 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 8 Desember 2025

Jam : 08.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Tiga Negeri Setda Kota Pekalongan

Hasil :

1. Evaluasi Capaian Inflasi
  - Inflasi November 2025: Inflasi tahunan nasional tercatat sebesar 2,72%, turun dari 2,86% pada bulan sebelumnya.
  - Target Pemerintah: Inflasi tetap terjaga dalam kisaran target 1,5% hingga 3,5%.
  - Inflasi Kalender (Year to Date): Hingga November 2025, angka inflasi berada di kisaran 2,27%.
2. Fokus Utama: Kesiapan Nataru

Rapat memberikan perhatian khusus pada persiapan menghadapi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Poin-poin instruksi meliputi :

- Antisipasi Lonjakan Harga: Seluruh kepala daerah diminta mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan yang biasa terjadi di akhir tahun.
  - Komoditas Perhatian: Bawang merah, telur ayam ras, dan cabai merah menunjukkan tren kenaikan harga di minggu-minggu akhir November.
  - Monitoring Data: Pemerintah daerah diwajibkan melakukan monitoring stok dan harga secara terkoordinasi berbasis data aktual.
3. Agenda Pendukung Lainnya :

Selain inflasi, rapat ini juga merangkaikan pembahasan mengenai :

- Evaluasi Program 3 Juta Rumah: Meninjau dukungan pemerintah daerah terhadap



program prioritas nasional tersebut.

- Sinergi Instansi: Melibatkan BPS, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan, dan TNI untuk memastikan kelancaran distribusi pangan.

4. Instruksi untuk Pemerintah Daerah (Pemda)

Menteri Dalam Negeri menekankan langkah konkret bagi daerah dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi :

- Melaksanakan Operasi Pasar Murah dan sidak ke pasar/distributor.
- Memperkuat Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi pasokan pangan.
- Optimalisasi penggunaan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk mendukung transportasi logistik pangan.

**10.** Rapat Koordinasi minggu III bulan Desember 2025 membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 15 Desember 2025

Jam : 08.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat BPKAD Kota Pekalongan

Hasil :

1. Status Inflasi Nasional: Target inflasi dijaga pada rentang 1,5% s.d. 3,5%. Namun, terdapat 10 Provinsi dengan inflasi tertinggi (di atas target), dipimpin oleh Riau (4,27%) dan Papua Pegunungan (4,05%).
2. Komoditas Penyumbang Utama: Cabai Merah, Cabai Rawit, Beras, dan Daging Ayam Ras menjadi motor utama kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di akhir tahun 2025. Cabai Merah mengalami inflasi tahunan (YTD) sangat ekstrem sebesar 69,59%. Kendala distribusi akibat bencana dan logistik menyebabkan stok melimpah di produsen (Aceh) tapi harga tinggi di konsumen. Sebanyak 258 daerah melaporkan kenaikan harga daging ayam ras pada minggu ke-IV Desember, dengan kenaikan IPH tertinggi di Kab. Bandung Barat (2,39%).
3. Disparitas Harga Antar Daerah: Mayoritas bahan pangan strategis berada dalam status "Disparitas Tinggi". Wilayah Papua (seperti Kab. Puncak dan Intan Jaya) secara konsisten mencatat harga tertinggi nasional.
4. Beras Medium di Atas HET: Dari 80 kab/kota sampel, sebanyak 47 daerah mencatat harga beras medium yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Intervensi BULOG: Upaya stabilisasi dilakukan melalui perluasan titik pasar tradisional, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan pemantauan distribusi agar tidak ada penyimpangan harga.
5. Instruksi Penegakan HET: Menteri Pertanian menegaskan bahwa harga harus tetap sesuai HET. Pemda diminta mengawasi agar pedagang tidak mengambil untung tidak wajar di tengah situasi akhir tahun.
6. Optimalisasi Dana BTT: Pemerintah pusat mendorong Pemda menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mensubsidi biaya transportasi pangan guna memangkas disparitas harga.

**11.** Rapat Koordinasi minggu IV bulan Desember 2025 membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 22 Desember 2025

Jam : 08.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Rapat Tiga Negeri Setda Kota Pekalongan

Hasil :

1. Tren Inflasi Akhir Tahun: Secara historis, tekanan inflasi meningkat pada bulan Desember yang didorong oleh momentum HBKN Natal dan Tahun Baru, dengan andil terbesar dari kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi.
2. Komoditas Pangan Utama: Harga cabai rawit secara nasional per minggu ke-III Desember 2025 berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), dengan kenaikan sebesar 52,86% dibandingkan November 2025. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah, daging ayam ras, dan telur ayam ras akibat tingginya permintaan dan faktor cuaca (curah hujan tinggi).
3. Disparitas Harga Tinggi: Masih terjadi disparitas harga antar daerah yang tinggi (status "Tidak Aman") untuk komoditas beras medium, cabai rawit merah, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, minyakita, dan telur ayam ras.
4. Intervensi Stabilisasi Cabai: Pemerintah melaksanakan "Aksi Hadirkan Cabai Harga Petani" di Jakarta dan 16 kabupaten, serta mendorong penguatan kerja sama antar daerah (KAD) dan penambahan luas tanam di daerah defisit sebagai solusi jangka panjang.
5. Pengendalian Minyakita: Produsen diwajibkan memasok minimal 35% dari distribusinya ke Perum BULOG atau BUMN Pangan. Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita tetap di angka Rp15.700/liter, dan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada pengecer yang melanggar.
6. Realisasi DMO Minyak Goreng: Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat (Minyakita) merupakan hasil kewajiban pasok domestik (DMO) dari produsen, bukan subsidi APBN, dengan realisasi pada Desember 2025 mencapai 103.911 ton.
7. Strategi Jelang 2026: Langkah pemerintah provinsi meliputi penjaminan ketersediaan stok, stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), menjaga kelancaran distribusi logistik ke daerah terpencil/terdampak bencana, serta penguatan monitoring harian stok pangan.

**12.** Rapat Koordinasi minggu V bulan Desember 2025 membahas langkah konkrit pengendalian inflasi di daerah yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 29 Desember 2025

Jam : 08.00 WIB – selesai

Tempat : Daring melalui Zoom Meeting

Hasil :

1. Status Inflasi Nasional: Realisasi inflasi provinsi berada pada rentang 0,80% hingga 4,27%. Provinsi Riau mencatat inflasi tertinggi (4,27%), sementara target nasional dipatok pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.
2. Komoditas Kritis: Cabai Merah, Cabai Rawit, dan Beras Medium menjadi penyumbang utama inflasi. Cabai Merah mencatatkan kenaikan harga tahunan (YTD) yang sangat signifikan sebesar 69,59%.

Tantangan Disparitas Harga: Terjadi kesenjangan harga yang tinggi antar wilayah,

3. terutama pada komoditas bawang, cabai, dan daging ayam. Hal ini diperburuk oleh kendala logistik dan dampak bencana di daerah produsen.
4. Kondisi Harga Beras: Hingga akhir Desember 2025, terdapat 47 kabupaten/kota yang harga berasnya sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
5. Intervensi BULOG: BULOG menggenjot penyaluran beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), penambahan jaringan pengecer di pasar tradisional, dan monitoring ketat bersama Satgas Pangan.
6. Optimalisasi Anggaran Daerah: Pemda didorong menggunakan Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk subsidi transportasi pangan guna menstabilkan pasokan dan harga di tingkat konsumen.
7. Instruksi Menteri Pertanian: Menekankan agar harga di tingkat konsumen tetap terjaga sesuai HET dan melarang keras adanya pengambilan keuntungan tidak wajar dalam situasi akhir tahun.
8. Update PBG MBR: Program pembebasan tarif PBG (0 Rupiah) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah telah mencapai 214.501 unit di seluruh Indonesia, dengan capaian tertinggi di Provinsi Jawa Barat.

### **13. Penyaluran Bansos melalui Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan**

Bansos Paket Sembako Dhuafa sebanyak 800 penerima manfaat di distribusikan dan disalurkan pada hari Rabu s/d Rabu tanggal 10 s/d 17 Desember 2025 di Kelurahan masing-masing. Program Bantuan ini dilaksanakan untuk membantu meringankan beban hidup masyarakat yang membutuhkan demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Bansos Paket Sembako bagi lansia 637 orang, Disabilitas 229 orang, Anggota/Janda Veretan 31 orang, Ahli Waris Pejuang 3 Oktober 15 orang, dan Bansos Berupa Beras ke 30 Yayasan dengan jumlah 949 orang dan didistribusikan pada tanggal 29 Desember 2025.

### **14. Rekonstruksi Jalan oleh DPUPR Kota Pekalongan**

**15. Pemantauan Harga Pangan Strategis, Pemantauan Stok dan Pasokan Pangan, Inovasi Program Biosalin, Gerakan Pangan Murah, Penyaluran Subsidi Harga Pangan dengan difasilitasi Dinas Pertanian dan Pangan.**

**16. Pengawasan dan Pemantauan Harga Jelang HBKN Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.** Pengawasan dilakukan pada hari Senin-Kamis, 1-4 Desember 2025 pukul 09.00-selesai, berlokasi di pasar tradisional Kota Pekalongan, supermarket dan minimarket berjenjang, distributor beras, agen dan pangkalan gas LPG 3Kg dan Pertamina. Kegiatan dibagi menjadi empat tim dengan jadwal kunjungan lokasi yang sudah ditentukan selama empat hari, anggota tim merupakan gabungan antara beberapa OPD pengawasan meliputi stok ketersediaan, harga barang dan kondisi barang dalam keadaan baik.

**17. Pengembangan penjualan produk olahan ikan oleh UMKM binaan DKP Kota Pekalongan.**

**18. Pemberian benih nila secara gratis ke masyarakat Kota Pekalongan dengan tujuan menstimulus kegiatan budidaya, meningkatkan kegiatan ekonomi dan menjaga ketersediaan dan harga ikan nila.** Pada triwulan 3 tahun 2025 benih yang diberikan ke masyarakat total 81.825 ekor dengan 2-5 cm.

**19.** Melakukan Pendataan dan pembinaan terhadap usaha cold storage. Dengan adanya cold storage harga ikan di Kota Pekalongan bisa stabil, karena saat hasil ikan melimpah, ikan bisa disimpan di cold storage.

**20.** Pelayanan pelelangan ikan di TPI setiap hari Senin s/d Minggu sehingga memudahkan nelayan menjual hasil ikan dan masyarakat mudah mendapatkan ikan dengan harga lebih murah.

**21.** Penataan lalu lintas dan pengadaan posko pengaturan lalu lintas dalam periode natal dan tahun baru.

#### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Pekalongan pada Triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Kota Pekalongan dan koordinasi dengan dengan TPID Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kota Pekalongan.
2. Kebutuhan akan inovasi dalam mendukung ketersediaan pangan sepanjang tahun dan kelancaran distribusi serta indikasi surplus devisa pangan di masing-masing daerah.

#### 5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Kota Pekalongan pada Triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan serta kelancaran distribusi yang
2. Mengidentifikasi Strategi Aksi mengantisipasi ketersediaan pangan dalam kondisi yang tidak ideal.

Melanjutkan dan meningkatkan koordinasi antar anggota TPID untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga